

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Hartono, Meyzi Heriyanto, dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Effect of Financial Performance on Economic Growth with Capital Expenditures as Intervening Variables. This study aims to examine and obtain empirical evidence of the direct influence of the financial performance of local governments as measured by the ratio of the degree of fiscal decentralization, fiscal dependence, financial independence, effectiveness of local own revenue (PAD), and the level of contribution of BUMD to the ratio of capital expenditure allocation. This research uses a quantitative research method approach. The source of the data used is secondary data in the form of financial statements of regency / city governments throughout Riau Province in 2011 s.d. 2017. Data analysis techniques used path analysis with the program Eviews. The population of this research is all regency / city regional governments in Riau Province in 2011-2017. The results of this study indicate that financial performance simultaneously influences the allocation of capital expenditure and partially, the ratio of fiscal dependence and contribution of BUMD has a positive effect on the allocation of capital expenditure, while the ratio of the degree of decentralization, financial independence and effectiveness of local own revenue (PAD) do not affect the allocation capital expenditure. Capital expenditure allocation does not affect economic growth. Likewise, capital expenditure allocation does not have a mediating effect on the relationship of financial performance to economic growth.

Key words: financial performance, capital expenditure, economic growth

Abstrak: Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan fiskal, kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan tingkat kontribusi BUMD terhadap rasio alokasi belanja modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2011 s.d. 2017. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan Program Eviews. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten / kota se-Provinsi Riau tahun 2011-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan secara parsial, rasio ketergantungan fiskal dan kontribusi BUMD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan dan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga alokasi belanja modal tidak memiliki efek memediasi atas hubungan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: kinerja keuangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berjalan 19 (sembilan belas) tahun ditandai dengan lahirnya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali revisi yaitu pada tahun

2004 dengan UU No 32 tahun 2004, tahun 2014 dengan UU No 23 tahun 2014, dan terakhir tahun 2015 dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah lahir dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam UU 22/1999 yaitu dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

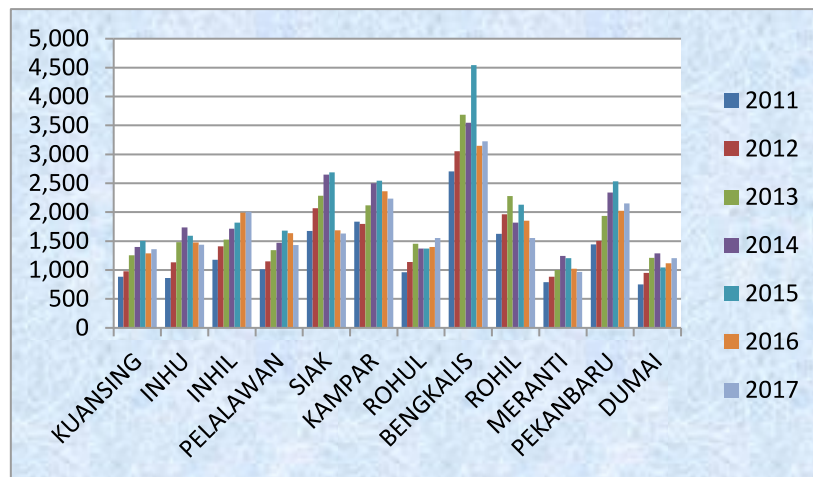
Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) dalam Arsa (2015), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari

kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Namun demikian, pemerintah daerah, dalam proses menuju peningkatan kemampuan keuangan tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dirasakan kurang. Hal ini tercermin dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sebagian besar pemerintah daerah yang dirasakan masih rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan BPS diperoleh fakta bahwa bagian pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 75-94 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara rata-rata nasional hanya memberikan kontribusi antara 6-15 persen pendapatan daerah (Mahmudi, 2009)

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja operasi, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk periode tahun 2011-2017 disajikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Kecenderungan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011 - 2017

Gambar 1 menunjukkan bahwa kecenderungan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode tahun 2011 s.d. 2017, secara umum dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi yaitu dari tahun 2011 s.d. 2015 cenderung meningkat sedangkan tahun 2016 dan 2017 cenderung turun. Rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode tahun 2011 s.d. 2017 sebesar 1.724,71 milyar rupiah dimana belanja pemerintah daerah tertinggi pada tahun 2015 sebesar 2.055,72 milyar rupiah dan terendah pada tahun 2011 sebesar 1.310,46 milyar rupiah. Jika dilihat dari peringkat tertinggi rata-rata

realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode tahun 2011 s.d. 2017 adalah berturut-turut Kabupaten Bengkalis sebesar 3.415,38 milyar rupiah, Kabupaten Kampar sebesar 2.198,75 milyar rupiah, dan Kabupaten Siak sebesar 2.098,39 milyar rupiah. Selama tahun 2011 sampai dengan 2017, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Riau bersifat fluktuatif dengan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lebih-lebih untuk daerah penghasil minyak seperti Kab. Bengkalis, Kab. Siak, dan Kab. Kampar yang memiliki APBD terbesar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Se-Provinsi Riau, Tahun 2011-2017

Kabupaten/Kota	Tahun							Rata2
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
KUANSING	4,17	5,93	5,47	5,14	(2,14)	3,88	4,43	3,84
INHU	5,25	8,39	6,21	5,53	(2,94)	3,68	4,02	4,31
INHIL	7,16	7,91	7,17	6,88	2,05	4,84	4,70	5,81
PELALAWAN	5,73	3,02	5,55	6,20	2,46	2,96	4,10	4,29
SIAK	(0,52)	2,07	(2,33)	(0,97)	(0,21)	0,35	0,94	(0,09)
KAMPAR	4,11	5,82	6,31	3,43	1,09	2,80	3,01	3,79
ROHUL	6,88	6,12	5,99	6,50	1,98	4,73	5,56	5,40
BENGKALIS	7,85	(0,65)	(3,27)	(3,85)	(2,74)	(2,44)	(1,77)	(0,98)
ROHIL	(0,01)	3,65	2,38	4,81	0,52	2,08	2,03	2,21
MERANTI	6,88	6,70	4,24	4,45	2,85	3,20	3,32	4,52
PEKANBARU	7,54	7,82	5,59	6,90	5,57	5,95	6,10	6,49
DUMAI	4,27	3,66	3,68	2,69	2,03	4,18	4,45	3,57
Rata2	4,94	5,03	3,92	3,98	0,88	3,02	3,41	3,60

Sumber Data: PDRB Kab/Kota se-Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2011-2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode tahun 2011 s.d. 2017, secara umum dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi dan cenderung turun. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode tahun 2011 s.d. 2017 sebesar 3,60% dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2012 sebesar 5,03% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,88%.

Jika dilihat dari kondisi kabupaten/kota yang mengelola Belanja Daerah tiga terbesar yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak pertumbuhan ekonominya fluktuatif dengan kisaran angka rata-rata minus 0,98% hingga 3,79%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan daerah berdasarkan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2011 s.d. 2017?.

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas,

rasio efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011).

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2002).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung Kinerja keuangan daerah berdasarkan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2011 s.d. 2017.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, penggunaan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2011). Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini tergolong kepada bentuk penelitian asosiatif hubungan kausal, yakni penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat (Sugiono, 2011). Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2011-2017. Peneliti mengambil sampel seluruh populasi penelitian yaitu dua belas (12) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiono, 2011). Sumber data sekunder diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk data Pertumbuhan Ekonomi seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) de-

ngan Program Eviews berdasarkan data sekunder, dimana metode ini menguji secara bersama-sama model yang terdiri dari variabel independen, variabel mediasi (intervening) dan variabel dependen.

HASIL

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Tahun 2011 s.d. 2017. Data penelitian meliputi duabelas kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam rentang waktu tahun 2011 s.d.

2017. Berikut adalah gambaran umum data penelitian seperti pada Tabel 5.1. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran sampel penelitian. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011:19). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), maksimum, dan minimum.

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_DD	84	2,40	32,12	8,9233	5,74426
X2_KetKeu	84	58,67	97,05	88,5283	7,92546
X3_KemKeu	84	2,72	48,61	10,6719	8,17883
X4_EfPAD	84	47,45	220,34	104,4405	31,74965
X5_DKBUMD	84	,00	69,05	11,7651	13,61674
Y1_BM	84	13,28	49,38	24,3452	7,56632
Y2_PTE	84	,00	8,39	3,8799	2,43717
Valid N (listwise)	84				

Sumber Data: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan Tabel 2 variabel kinerja keuangan diukur melalui pencapaian Derajat Desentralisasi (X1_DD), Ketergantungan Keuangan (X2_KetKeu), Kemandirian Keuangan (X3_KemKeu), Efektifitas PAD (X4_EfPAD), Derajat Kontribusi BUMD (X5_DKBUMD).

Variabel alokasi belanja modal yang merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya mempunyai nilai rata-rata sebesar 24,34%. Nilai tertinggi variabel ini sebesar 49,38%, nilai terendah sebesar 13,28%, dan standar deviasi sebesar 7,56%. Alokasi belanja modal terbesar yakni 49,38% terjadi pada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013. Belanja modal terendah yaitu sebesar 13,28% terjadi pada Kabupaten Siak tahun 2017.

Pengujian Kesesuaian Model

Variabel Hasil pengujian terhadap kesesuaian model menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

1. Uji Chow (*Chow Test*)

Chow Test yakni pengujian untuk menentukan model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : *Common Effect Model* atau *Pooled OLS*

H1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel, maka H0 ditolak, yang

berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil ($<$) dari F

tabel maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

Hasil pengujian ditunjukkan seperti pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Keterangan	Persamaan 1	Persamaan 2
F Hitung	4,010	6,176
F Tabel	1,930	1,930

Sumber Data: Output Common Effect Regresi Data Panel dengan Eviews

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai F hitung untuk kedua persamaan lebih besar dari F tabel, yaitu untuk persamaan 1, diperoleh F hitung sebesar 4,010 lebih besar dari F tabel sebesar 1,930. Sedangkan untuk persamaan 2 diperoleh F hitung sebesar 6,176 lebih besar dari F tabel sebesar 1,930. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, maka model yang dipilih atas dua persamaan tersebut adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan fixed effect atau random effect.

Hipotesis dalam uji Hausman adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dari hasil pengujian diperoleh hasil seperti pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Keterangan	Persamaan 1	Persamaan 2
Chi Square	15,5549	8,7500
P Value	0,0082	0,0031

Sumber Data: Output Random Effect Regresi Data Panel dengan Eviews

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai P Value untuk kedua persamaan lebih kecil dari $\alpha=0,05$, yaitu untuk persamaan 1 diperoleh p-value sebesar 0,0082 dan persamaan 2 diperoleh p-value sebesar 0,0031. Apabila p-value lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Path Analysis

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengetahui pola hubungan variabel-variabel penelitian dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun penga-

ruh variabel-variabel tersebut secara individual. Analisis path merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antara dua atau lebih variabel.

1. Uji Kelayakan Model

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*.

a. Uji F

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil seperti pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji F

Keterangan	Persamaan 1	Persamaan 2
F Hitung	4,3709	6,5587
Prob (F-statistic)	0,00	0,00

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 5, Berdasarkan model *fixed effect*, diperoleh nilai Prob (F-statistik) untuk persamaan 1 dan persamaan 2 sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada persamaan 1 secara simultan variabel Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD dan Kontribusi BUMD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada Persamaan 2 Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai R² persamaan 1 sebesar 0,5107, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan vari-

asi-variabel dependen sebesar 51,07 persen, sisanya 48,93 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti. Nilai R² persamaan 2 sebesar 0,5257, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen sebesar 52,57 persen, sisanya 47,43 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti.

2. Uji Pengaruh Langsung

Uji hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program Eviews, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$.

Tabel 6. Hasil Uji t (Pengaruh Langsung)

Variabel	β	Std Error	t hitung	Sig
X1 —————> Y1	-1.0793	1.061432	-1.0168	0.3129
X2 —————> Y1	0.5496	0.187682	2.9287	0.0046
X3 —————> Y1	0.9343	0.816885	1.1437	0.2568
X4 —————> Y1	0.0022	0.026239	0.0862	0.9315
X5 —————> Y1	0.3124	0.100775	3.1006	0.0028
Y1 —————> Y2	0.0141	0.039560	0.3567	0.7223

Sumber Data: Output Random Effect Regresi Data Panel dengan Eviews

3. Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pada penelitian ini, uji sobel digunakan untuk menguji analisis path. Hasil uji

sobel ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Sobel (Pengaruh Tidak Langsung)

Variabel	Coefficient	Std Error	axb	$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}$	Uji Sobel $Z = ab/sab$
X1Y1Y2	-1.0793	1.061432	-0,015218	0,045	- 0,336
X2Y1Y2	0.5496	0.187682	0,007740	0,021	0,353
X3Y1Y2	0.9343	0.816885	0,013173	0,038	0,340
X4Y1Y2	0.0022	0.026239	0,000031	0,000	0,081
X5Y1Y2	0.3124	0.100775	0,004404	0,012	0,354

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas maka dapat disimpulkan pengaruh tidak langsung komponen kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel alokasi belanja modal sebagai berikut:

1. Pengaruh tidak langsung Derajat Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar -0,336 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Derajat Desentralisasi melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh tidak langsung Ketergantungan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,353 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Ketergantungan Keuangan melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh tidak langsung Kemandirian Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,354 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Kemandirian Keuangan melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Pengaruh tidak langsung Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,081 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Efektivitas PAD melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Pengaruh tidak langsung Derajat Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,354 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Derajat Kontribusi BUMD melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis variabel Derajat Desentralisasi mempunyai koefisien beta sebesar -1,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,312 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Artinya Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja, namun tidak signifikan.

Kondisi ini disebabkan relatif rendahnya PAD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau yaitu rata-rata sebesar 8,92% dari total penerimaan daerah. Meskipun kecenderungan

derungan terjadi peningkatan PAD setiap tahun dari tahun 2011 s.d 2017 dengan rata-rata sebesar 0,17% namun tidak cukup mampu untuk meningkatkan porsi belanja modal dalam APBD. Bahkan yang terjadi adalah penurunan terhadap porsi belanja modal dengan rata-rata penurunan sebesar minus (-) 0,03%.

Pengaruh Ketergantungan Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis variabel Ketergantungan Keuangan mempunyai koefisien beta sebesar 0,549 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini ditolak. Artinya Ketergantungan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Seharusnya semakin besar ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat atau provinsi maka alokasi belanja modal semakin kecil. Demikian juga sebaliknya semakin kecil ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat atau provinsi maka alokasi belanja modal semakin besar.

Berdasarkan deskripsi data variabel ketergantungan keuangan daerah mengalami kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2013 penerimaan transfer daerah sebesar 89,37% dari total penerimaan daerah terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 82,61%. Namun disisi lain juga terjadi penurunan terhadap belanja modal sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, yang awalnya sebesar 28,89% menjadi 19,37% atau terjadi penurunan secara rata-rata sebesar minus (-) 0,03%.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis variabel Kemandirian Keuangan mempunyai koefisien beta sebesar 0,934 dengan nilai signifikansi sebesar 0,256 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, namun pengaruhnya tidak signifikan.

Berdasarkan deskripsi variabel kemandirian keuangan memiliki porsi rata-rata dari tahun 2011 s.d 2017 sebesar 10,67%. Kecenderungannya semakin meningkat yang ditunjukkan dari tahun 2011 sebesar 7,30% dan setiap tahun mengalami sedikit kenaikan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 17,86% atau rata-rata kenaikan sebesar 0,19%. Disisi lain belanja modal kecenderungannya proporsinya terhadap total belanja semakin menurun yaitu pada tahun 2011 sebesar 23,75%, sempat mengalami kenaikan tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing menjadi sebesar 26,43% dan 28,89%, namun tahun-tahun selanjutnya terus mengalami penurunan, terakhir pada tahun 2017 alokasi belanja modal hanya sebesar 19,37% atau terjadi penurunan secara rata-rata sebesar minus (-) 0,03%.

Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis variabel Efektivitas PAD mempunyai koefisien beta sebesar 0,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,9315 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis keempat yang dikembangkan dalam penelitian ini ditolak. Hal ini berarti Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, namun pengaruhnya tidak signifikan.

Berdasarkan deskripsi variabel Efektivitas PAD dari tahun 2011 s.d 2017, kecenderungannya selalu mencapai target kecuali tahun 2015 dan 2016 yang hanya mencapai 92,85% dan 82,25%. Secara rata-rata terjadi kenaikan pencapaian dari tahun 2011 s.d 2017 sebesar 0,02%. Relatif kecilnya porsi PAD kabupaten/kota yaitu secara rata-rata sebesar 8,92%, disinyalir menyebabkan tidak luasnya pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis variabel Derajat Kontribusi BUMD mempunyai koefisien beta sebesar 0,312 terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini be-

rarti hipotesis kelima yang dikembangkan dalam penelitian ini diterima. Artinya Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan deskripsi variabel Derajat Kontribusi BUMD selama tahun 2011 s.d 2017 mengalami penurunan setiap tahun secara rata-rata sebesar minus (-) 0,11%. Disisi lain alokasi belanja modal juga mengalami penurunan secara rata-rata sebesar minus (-) 0,03%. Sehingga semakin rendah derajat kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah maka memberikan ruang gerak fiskal yang rendah bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal.

Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis variable Alokasi Belanja Modal mempunyai koefisien beta sebesar 0,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,7223 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis keenam yang dikembangkan dalam penelitian ini ditolak. Alokasi belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tidak Langsung Derajat Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung Derajat Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar -0,336 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Derajat Desentralisasi melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ini berarti hipotesis ketujuh dalam penelitian ini ditolak. Hal ini berarti mengindikasikan desentralisasi fiskal yang berjalan selama ini tidak mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modalnya yang dapat berefek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tidak Langsung Ketergantungan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung ketergantungan keuangan ter-

hadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,353 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung ketergantungan keuangan melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis yang kedelapan ditolak.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketergantungan keuangan mengalami penurunan, namun alokasi belanja modal juga menurun, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena kenyataannya pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dengan demikian alokasi belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi secara negatif.

Pengaruh tidak Langsung Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung Kemandirian Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,340 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Kemandirian Keuangan melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis kesembilan dalam penelitian ini ditolak.

Pengaruh tidak Langsung Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,081 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Efektivitas PAD melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis kesembilan dalam penelitian ini ditolak.

Meskipun secara umum realisasi PAD dapat mencapai target, namun disisi lain porsi PAD sebagai salah satu unsur penerimaan daerah kabupaten/kota relatif rendah yakni secara rata-rata sebesar 8,92% belum cukup besar memberikan ruang fiskal bagi peme-

rintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal yang lebih besar.

Pengaruh tidak Langsung Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung Derajat Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,354 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Derajat Kontribusi BUMD melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis kesebelas dalam penelitian ini ditolak.

Meskipun secara langsung Kontribusi BUMD terhadap belanja modal berpengaruh positif signifikan, namun karena belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka secara tidak langsung Kontribusi PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya alokasi belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

SIMPULAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan lima rasio keuangan pemerintah daerah. Kelima rasio tersebut adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap enam pengaruh langsung yang diuji, sebanyak dua model secara langsung berpengaruh yaitu Ketergantungan Keuangan dan Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan empat model lagi, disimpulkan tidak berpengaruh yaitu Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, dan Alokasi Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Kondisi ini menunjukkan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk

menggali potensi PAD sehingga porsi PAD relatif masih rendah kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Akibat lanjutannya tidak terdapat ruang fiskal yang cukup untuk mengalokasikan belanja modal yang semakin meningkat setiap tahunnya atas APBD Kabupaten/Kota. Secara tidak langsung kelima indikator kinerja keuangan yang dijadikan ukuran yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal. Belanja Modal relatif kecil dan kecenderungan semakin menurun setiap tahun sehingga tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsa, I. Ketut. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. Denpasar. Tesis S-2 Pascasarjana Universitas Udayana.
- Halim, Abdul. 2008. Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2009. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo, 2018. Perpajakan, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Penerbit Andi Publisher.
- Sugiono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Method*), Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Sularso dan Restianto, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Media Riset Akuntansi, 1 (2).